



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN GUNAWAN HUTAPEA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 276052

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.853.538.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.014.618.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.838.920.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.010.000.000

1. MOBIL, BMW SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV/SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.605.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. 399.213.890

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.683.066.136

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 17.550.818.026

III. HUTANG Rp. 2.838.937.428

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.711.880.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.